



SALINAN

**BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 21 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENJABARAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah **Nomor** Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang.....2

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan.....3

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2020 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah **Nomor** Tahun 2021 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 **Nomor**).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal4

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2020 terdiri dari:

| | | |
|---|----|---------------------------|
| a. Pendapatan | | |
| 1. Pendapatan Asli Daerah | Rp | 126.132.857.981,57 |
| 2. Dana Perimbangan | Rp | 869.263.101.911,00 |
| 3. Lain-lain Pendapatan yang sah | Rp | <u>278.113.677.885,11</u> |
| Jumlah Pendapatan | Rp | 1.273.509.637.777,68 |
| b. Belanja | | |
| 1. Belanja Tidak Langsung | | |
| a) Belanja Pegawai | Rp | 485.329.054.016,25 |
| b) Belanja Bunga | Rp | 0,00 |
| c) Belanja Subsidi | Rp | 1.500.000.000,00 |
| d) Belanja Hibah | Rp | 51.875.543.717,00 |
| e) Belanja Bantuan Sosial | Rp | 55.000.000,00 |
| f) Belanja Bagi Hasil | Rp | 1.525.089.600,00 |
| g) Belanja Bantuan Keuangan | Rp | 205.622.489.166,00 |
| h) Belanja Tidak Terduga | Rp | <u>11.394.582.006,00</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | Rp | 757.301.758.505,25 |
| 2. Belanja Langsung | | |
| a) Belanja Pegawai | Rp | 58.926.745.801,00 |
| b) Belanja Barang dan Jasa | Rp | 324.464.652.878,55 |
| c) Belanja Modal | Rp | <u>153.987.416.404,00</u> |
| Jumlah Belanja Langsung | Rp | <u>537.378.815.083,55</u> |
| Jumlah Belanja | Rp | 1.294.680.573.588,80 |
| Surplus/(Defisit) | Rp | (21.170.935.811,12) |
| c. Pembiayaan | | |
| 1. Penerimaan | Rp | 27.757.014.511,08 |
| 2. Pengeluaran | Rp | <u>768.000.000,00</u> |
| Jumlah Pembiayaan Netto | Rp | 26.989.014.511,08 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | Rp | 5.818.078.699,96 |

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal5

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 27 Agustus 2021

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 27 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021 NOMOR 21



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian
 Unit Organisasi : 4.05.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|-------------------|--|----------------------------|------------------|-------------------------|-------|--------------------------------------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | BELANJA | 18.502.232.913,00 | 6.564.380.921,00 | (11.937.851.992,00) | 35,48 | |
| 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 15.625.181.397,00 | 4.292.355.794,00 | (11.332.825.603,00) | 27,47 | |
| 5.1.00.00.1 | Belanja Pegawai | 15.625.181.397,00 | 4.292.355.794,00 | (11.332.825.603,00) | 27,47 | |
| 5.1.00.00.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 13.779.695.828,00 | 3.226.256.312,00 | (10.553.439.516,00) | 23,41 | |
| 5.1.00.00.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 12.858.957.668,00 | 2.355.699.600,00 | (10.503.258.068,00) | 18,32 | |
| 5.1.00.00.1.01.02 | Tunjangan Keluarga | 254.814.844,00 | 248.413.528,00 | (6.401.316,00) | 97,49 | |
| 5.1.00.00.1.01.03 | Tunjangan Jabatan | 199.136.938,00 | 191.685.000,00 | (7.451.938,00) | 96,26 | |
| 5.1.00.00.1.01.04 | Tunjangan Fungsional | 68.836.950,00 | 66.920.000,00 | (1.916.950,00) | 97,22 | |
| 5.1.00.00.1.01.05 | Tunjangan Fungsional Umum | 63.708.877,00 | 62.155.000,00 | (1.553.877,00) | 97,56 | |
| 5.1.00.00.1.01.06 | Tunjangan Beras | 149.871.380,00 | 136.584.120,00 | (13.287.260,00) | 91,13 | |
| 5.1.00.00.1.01.07 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 2.880.547,00 | 2.739.217,00 | (141.330,00) | 95,09 | |
| 5.1.00.00.1.01.08 | Pembulatan Gaji | 38.136,00 | 33.285,00 | (4.851,00) | 87,28 | |
| 5.1.00.00.1.01.09 | Iuran Asuransi Kesehatan | 159.674.784,00 | 142.267.373,00 | (17.407.411,00) | 89,10 | |
| 5.1.00.00.1.01.21 | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 5.443.896,00 | 4.939.774,00 | (504.122,00) | 90,74 | |
| 5.1.00.00.1.01.22 | Iuran Jaminan Kematian | 16.331.808,00 | 14.819.415,00 | (1.512.393,00) | 90,74 | |
| 5.1.00.00.1.02 | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | 1.845.485.569,00 | 1.066.099.482,00 | (779.386.087,00) | 57,77 | |
| 5.1.00.00.1.02.01 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 660.561.316,00 | 406.013.711,00 | (254.547.605,00) | 61,46 | |
| 5.1.00.00.1.02.05 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja | 1.028.356.372,00 | 599.509.671,00 | (428.846.701,00) | 58,30 | |
| 5.1.00.00.1.02.06 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya | 156.567.881,00 | 60.576.100,00 | (95.991.781,00) | 38,69 | Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 2.877.051.516,00 | 2.272.025.127,00 | (605.026.389,00) | 78,97 | |
| 5.2.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 569.110.518,00 | 460.820.022,00 | (108.290.496,00) | 80,97 | |
| 5.2.01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5.599.992,00 | 3.172.787,00 | (2.427.205,00) | 56,66 | |
| 5.2.01.01.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.599.992,00 | 3.172.787,00 | (2.427.205,00) | 56,66 | |
| 5.2.01.01.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 5.599.992,00 | 3.172.787,00 | (2.427.205,00) | 56,66 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|------------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.2.58.08.2 | Belanja Barang dan Jasa | 55.506.680,00 | 55.345.200,00 | (161.480,00) | 99,71 | |
| 5.2.58.08.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.700.480,00 | 5.683.000,00 | (17.480,00) | 99,69 | |
| 5.2.58.08.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.700.480,00 | 5.683.000,00 | (17.480,00) | 99,69 | |
| 5.2.58.08.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.357.800,00 | 5.352.200,00 | (5.600,00) | 99,90 | |
| 5.2.58.08.2.06.01 | Belanja Cetak | 2.608.600,00 | 2.603.000,00 | (5.600,00) | 99,79 | |
| 5.2.58.08.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.749.200,00 | 2.749.200,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 5.2.58.08.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.488.400,00 | 1.350.000,00 | (138.400,00) | 90,70 | |
| 5.2.58.08.2.11.04 | Belanja Makanan dan Minuman Lembur | 1.488.400,00 | 1.350.000,00 | (138.400,00) | 90,70 | |
| 5.2.58.08.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 42.960.000,00 | 42.960.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 5.2.58.08.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 42.960.000,00 | 42.960.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (18.502.232.913,00) | (6.564.380.921,00) | 11.937.851.992,00 | 35,48 | |

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|------------|---|----------------------------|---------------------|-------------------------|--------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.2.3 | Belanja Modal | 261.865.001.150,00 | 153.987.416.404,00 | (107.877.584.746,00) | 58,80 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (25.750.619.511,08) | (21.170.935.811,12) | 4.579.683.699,96 | 82,22 |
| 3 | PEMBIAYAAN DAERAH | | | | |
| 3.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 27.750.619.511,08 | 27.757.014.511,08 | 6.395.000,00 | 100,02 |
| 3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 27.748.488.148,08 | 27.747.888.148,08 | (600.000,00) | 100,00 |
| 3.1.5 | Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman | 2.131.363,00 | 9.126.363,00 | 6.995.000,00 | 428,19 |
| 3.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 2.000.000.000,00 | 768.000.000,00 | (1.232.000.000,00) | 38,40 |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 2.000.000.000,00 | 768.000.000,00 | (1.232.000.000,00) | 38,40 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 25.750.619.511,08 | 26.989.014.511,08 | 1.238.395.000,00 | 104,81 |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN | 0,00 | 5.818.078.699,96 | 5.818.078.699,96 | 0,00 |

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI